

RELASI AGAMA DAN BUDAYA DALAM HUBUNGAN INTERN UMAT ISLAM

The Relationship between Religion and Cultures among Muslims

JOKO TRI HARYANTO

Peneliti Balai Litbang
Agama Semarang
e-mail: jejakagama@yahoo.co.id

Naskah diterima: 22 Maret 2015;
Naskah diseleksi: 22 Mei 2015;
Naskah direvisi: 3 Juni 2015;
Naskah disetujui penulis: 20 Juni
2015.

ABSTRACT

Muslims in Indonesia are socially divided into different social configurations such as ethnicity, school of thought, religious organization, and so on. This study reveals the dynamics of the internal relations of Muslims in terms of the relation between religion and culture. The research was carried out in qualitative approach and was conducted in the province of Central Java, East Java, and Central Kalimantan. The dynamics of the internal relations of Muslims in these three areas showed three patterns of relations, namely the relation between religion and local traditions, the relation between religion and ethnicity, and the relation between religion and religious thought. Among them, it was the relation between religion and local traditions which had the strongest social cohesion, while the others were still dissociative in terms of internal muslim relation. The relation between religion and culture can be used as a strategy in an attempt to develop internal religious harmony in general.

Keyword: Social relations, Islam, religion, culture.

ABSTRAK

Umat Islam di Indonesia secara sosial terpilah dalam berbagai konfigurasi sosial seperti etnisitas, aliran pemikiran, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Penelitian ini mengungkapkan dinamika hubungan intern umat Islam dalam konteks relasi agama dan budaya. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Dinamika hubungan intern umat Islam di tiga wilayah ini menunjukkan tiga pola relasi, yaitu relasi agama dan tradisi lokal, relasi agama dan etnisitas, serta relasi agama dan pemikiran keagamaan. Dalam ketiga relasi tersebut kohesi sosial yang paling kuat dalam hubungan intern umat Islam adalah relasi agama dan tradisi lokal. Sementara dua bentuk relasi lainnya masih menyisakan interaksi disosiatif pada hubungan intern umat Islam. Relasi agama dan budaya dapat dijadikan strategi dalam upaya membanun kerukunan intern umat beragama secara umum.

Kata kunci: Relasi sosial, Islam, agama, budaya.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Realitas umat Islam terbangun atas konfigurasi sosial yang terbentuk dari identitas-identitas kelompok seperti kelompok aliran keagamaan, organisasi sosial keagamaan,

etnisitas, profesi, dan sebagainya, yang melingkupi diri kaum muslimin di masyarakat. Keberadaan kelompok pemilik identitas dalam umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masyarakat secara keseluruhan. Umat Islam terbangun atas struktur sosial masyarakat yang memeluk agama Islam, yang walaupun mengenakan identitas-identitas yang saling berbeda, tetapi membangun

kesatuan utuh sebagai umat Islam.

Umat Islam di Indonesia bukan suatu kelompok yang monolitik, terdapat kemajemukan dalam berbagai tradisi, pemahaman, dan praktek-praktek keagamaan yang merupakan ekspresi dari keislaman yang diyakininya. Pemahaman keagamaan mendorong munculnya gerakan keagamaan atau menjadi kelompok keagamaan tertentu yang membedakan dirinya dengan kelompok pemahaman yang lain. Ormas atau organisasi kemasyarakatan bisa muncul membawa aspirasi pemahaman keagamaan, aktivitas keagamaan, aktivitas sosial dan ekonomi, maupun politik tertentu.

Konfigurasi sosial umat Islam tidak dipungkiri juga menjadi potensi pemilahan sosial yang rawan konflik. Segregasi sosial akibat pemilahan ini memungkinkan munculnya batas-batas budaya (*cultural boundaries*). Perasaan kelompok bisa terbangun dalam bentuk sentimen kelompok ormas maupun kelompok etnis yang semakin mempertegas batas-batas tersebut. Batas-batas budaya ini apabila mengalami ketegangan maka dapat berpotensi menjadi konflik antarkelompok. Namun sebaliknya, batas-batas budaya ini dapat menjadi cair dan lentur oleh intensitas interaksi, penerimaan, dan toleransi satu kelompok atas kelompok yang lain (Haryanto, 2013:14).

Hubungan antarkomunitas atau kelompok dalam masyarakat muslim terjadi dalam dinamika relasi damai maupun relasi konflik. Sementara situasi rukun dan damai dalam masyarakat merupakan cita dan harapan semua orang. Belajar dari pengalaman interaksi yang damai maupun konflik ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk mendorong faktor-faktor kerukunan dapat bekerja, serta strategi adaptasi yang memungkinkan terciptanya kerukunan di masyarakat, khususnya kerukunan intern umat Islam.

Konfigurasi umat Islam membentuk hubungan-hubungan sosial yang terkait dengan konteks hubungan kelompok-kelompok intern umat Islam sendiri. Dengan demikian, penting

untuk mengetahui bagaimana pola-pola relasi sosial yang terjadi dalam hubungan intern umat Islam, dan apa bentuk relasi yang ideal bagi terciptanya kerukunan beragama dalam intern umat Islam.

Konteks umat Islam di Indonesia dapat diwakili oleh umat Islam di beberapa lokasi yang memiliki karakteristik hubungan sosial antarkonfigurasi, seperti etnisitas, pemikiran keagamaan, dan budaya. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan pola-pola relasi sosial dalam intern umat Islam dan mengungkapkan pola yang strategis bagi upaya kerukunan umat beragama, khususnya intern umat Islam. Tulisan ini dapat memberikan informasi dan melengkapi hasil-hasil kajian tentang persoalan kerukunan umat beragama di masyarakat, khususnya kerukunan intern umat Islam. Selain itu, manfaat praktis bisa dipetik guna penyusunan kebijakan dalam bidang kehidupan beragama dan penyusunan strategi resolusi atau *peace building* di masyarakat.

Kerangka Teoretik

Masyarakat dalam perspektif fungsionalisme struktural dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan saling mempengaruhi secara ganda dan timbal balik. Integrasi sosial dalam suatu masyarakat tidak pernah tercapai dengan sempurna, tetapi secara fundamental bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Adapun ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan akan senantiasa terjadi juga, tetapi di dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan demikian perubahan dipandang sebagai proses adaptasi dan penyesuaian, dan tumbuh bersama dengan differensiasi dan inovasi yang diintegrasikan melalui pemilikan nilai-nilai yang sama (Zamroni, 1992: 25; Nasikun, 1992: 11-12).

Relasi sosial dapat berbentuk relasi yang bersifat asosiatif maupun disosiatif. Interaksi yang asosiatif adalah hubungan sosial dalam

masyarakat yang terwujud dari adanya kehendak rasional antarelemen masyarakat, dalam pengertian segala hal yang disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Proses ini mengarah pada semakin kuatnya ikatan antara pihak-pihak yang berhubungan. Proses ini meliputi bentuk kerjasama dan akomodasi. Di sisi lain, interaksi dissosiatif merupakan bentuk hubungan sosial yang mengarah pada perpecahan atau merenggangnya hubungan sosial antarpihak yang saling berhubungan. Proses ini dapat berbentuk persaingan, kontravensi, maupun pertentangan (Soekanto, 1982: 71).

Relasi sosial ini juga terkait dengan karakteristik sosial dari bentuk-bentuk konfigurasi sosial masyarakat dalam bentuk identitas sosial. Menurut Jenkin (dalam Jamil, 2012: 19), identitas sosial merupakan konsep tentang siapa seseorang atau kelompok orang dikenali oleh orang/kelompok lain, atau juga mengenai seseorang dikenali dalam kelompoknya sendiri. Dengan demikian identitas sosial merupakan ciri-ciri kelompok yang membedakan dengan kelompok lain, dalam hal ini dapat berbentuk identitas etnis (*ethnicity*) yang terbentuk karena perbedaan budaya, tradisi, dan bahasa. Persinggungan antarkelompok menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian sosial guna memelihara keberadaan (eksistensi) kelompok mereka di antara kelompok-kelompok yang lain. Oleh karena itu, masing-masing kelompok berupaya hidup bersama dalam perbedaan-perbedaan identitas tersebut dengan mengembangkan strategi adaptasi, yakni cara-cara yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan situasi sosialnya. Pengertian adaptasi dalam hal ini merujuk pada mekanisme bagaimana manusia memperoleh keinginannya atau menyesuaikan hidupnya kepada lingkungan pergaulannya (Jamil, 2012: 30).

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Tulisan ini merupakan analisis lanjutan dari tiga temuan penelitian tentang dinamika

hubungan internumat beragama oleh Balai Litbang Agama Semarang tahun 2012. Penelitian tersebut dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu penelitian di Jawa Tengah dilakukan oleh Sodli (2012), di Jawa Timur oleh Rachmadani (2012), dan di Kalimantan Tengah oleh Haryanto (2012). Ketiga provinsi ini secara kuantitatif berpenduduk mayoritas beragama Islam, dan memiliki dinamika hubungan intern umat Islam yang khas. Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur telah memiliki sejarah Islam yang sangat panjang hubungannya dengan budaya pra-Islam yang dianggap sebagai tradisi asli atau *indigenous Java*, maupun aliran keagamaan dalam Islam yang datang dari luar Indonesia. Sementara Kalimantan Tengah dinamika hubungan masyarakatnya sangat diwarnai corak hubungan etnisitas.

Penelitian yang dilaksanakan di Jawa Tengah mengambil lokus hubungan intern umat Islam di Kabupaten Banyumas, di mana di wilayah tersebut ada dua komunitas muslim yang memiliki perbedaan pemahaman dan tradisi dengan umat Islam pada umumnya yaitu komunitas Islam Aboge, dan yayasan Masjid Al-Fatah Sumampir. Sedangkan penelitian di Jawa Timur dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan tentang hubungan intern umat Islam terkait dengan komunitas Syiah dan kelompok muslim yang berada di wilayah Gunung Tengger yang masih memegang kuat tradisi *Kasada (Kasodo)*. Adapun penelitian di Kalimantan Tengah dilakukan untuk melihat hubungan intern umat Islam kaitannya dengan persoalan etnisitas yang dilakukan di Kota Palangkaraya dan Sampit, di mana kedua wilayah ini tahun 2001 pernah mengalami konflik etnis yang cukup besar.

Metode Pengumpulan Data dan Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan metode wawancara, observasi, telaah dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD). Wawancara ditujukan untuk menggali pandangan mereka terhadap dinamika hubungan internumat Islam dan mendalami

aspek-aspek terkait dengan persoalan tersebut. Teknik observasi dilakukan untuk melihat secara langsung perikehidupan dan interaksi sosial yang dilakukan umat Islam, baik dalam lingkup kelompok tertentu maupun lintas kelompok.

Telaah dokumen dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan persoalan penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis, baik laporan-laporan dari lembaga pemerintah maupun lainnya, dan perda (peraturan daerah) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang relevan dengan penelitian ini. Adapun *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk mengkonfirmasi data-data yang telah diperoleh dan menggali informasi-informasi baru yang belum diperoleh dalam teknik lainnya.

Analisis terhadap data-data penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pola Hubungan Intern Umat Islam

1. Relasi Agama dan Tradisi Lokal

Hubungan intern umat beragama, pada beberapa kelompok masyarakat, khususnya yang berada di wilayah tradisi dan budaya keagamaan dapat dilihat pada hubungan penganut Islam Aboge di Banyumas Jawa Tengah dan penganut tradisi Tengger di Pasuruan Jawa Timur. Dua lokus tersebut dapat menjadi gambaran tentang relasi agama dengan tradisi lokal dalam konteks hubungan intern umat Islam. Masyarakat penganut Aboge dan Masyarakat Tengger yang beragama Islam menyatukan aspek budaya lokal dengan keberagaman mereka.

Aliran Islam Aboge sudah mulai ada di daerah Pekuncen Banyumas sejak sebelum kemerdekaan. Aboge sendiri adalah singkatan dari *Alif Rebo Wage*, yaitu suatu hitungan yang dipakai oleh penganut Aboge untuk menentukan tanggal, bulan, dan tahun seperti halnya Hijriah atau Masehi. Penganut aliran Aboge dalam

menentukan bulan Ramadan tidak memakai kalender hijriah, akan tetapi menggunakan kalender (*almanac*) Aboge. Hal inilah yang menjadikan awal dan akhir bulan puasa bagi penganut aliran Islam Aboge berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Demikian pula dalam ibadah lainnya sama, hanya yang khas dilakukan penganut Islam Aboge adalah Sholat Ied yang disebut sholat *Ngitqi* (*Itqi*) setelah puasa Syawal pada tanggal delapan bulan Syawal pagi hari, dan sholat Rebo Wekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu pagi terakhir bulan Safar (Sodli, 2012).

Perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya konflik di masyarakat lingkungan Aboge. Hubungan antara penganut Islam Aboge dan umat Islam pada umumnya (Islam *mainstream*) berjalan dengan baik dan rukun. Hal ini terlihat dari pelaksanaan shalat jamaah di masjid Islam Aboge, masjid Rabak yang tidak hanya diikuti oleh penganut Aboge saja tetapi juga yang lain. Demikian pula kegiatan tradisi lainnya seperti sedekah bumi dan slametan yang umumnya diisi dengan tahlilan juga dilakukan bersama-sama, bahkan adakalanya dipimpin oleh pimpinan Aboge Kyai Zaenal (Sodli, 2012).

Hubungan umat Islam dengan masyarakat yang memegang tradisi juga terjadi di lingkungan masyarakat Tengger, Jawa Timur. Daerah Tengger merupakan wilayah lereng Gunung Bromo yang terkenal dengan tradisi *Kasodo*, yakni ungkapan rasa syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan sesaji berbagai hasil bumi pada kawah Gunung Bromo. Masyarakat Tengger pada masa lalu memiliki kepercayaan lokal Tengger. Mulai tahun 1900-an ketika di daerah Tosari dibangun hotel oleh pemerintahan kolonial Belanda, di antara buruh-buruh bangunan adalah pemeluk Islam yang akhirnya menetap dan mendakwahkan Islam di wilayah pegunungan Tengger. Tahun 1960 hingga 1967 merupakan masa puncak masuknya warga Tengger ke dalam Islam, yakni dengan masuknya Nahdatul Ulama (NU) ke Desa Tosari untuk mengembangkan dakwah Islam. Selain itu, dilatarbelakangi peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang melibatkan Partai Komunis

Indonesia, masyarakat Tengger banyak yang memeluk Islam untuk menyelamatkan diri agar tidak disangkutkan dengan PKI. Hingga kini, sudah banyak masyarakat Tengger yang telah memeluk Islam. Pendakwah Islam, terutama dari kalangan NU, diterima dengan tangan terbuka karena mereka tidak mengusik tradisi masyarakat asli Tengger bahkan belajar adat Tengger, dan bahkan oleh pendakwah Islam menjadi jalan untuk berdakwah. Bahkan ketika Islam sudah masuk di masyarakat Tengger, meskipun bukan muslim ketika ada peristiwa kematian maka mereka meminta untuk ditahlilkan. Inilah yang disebut Upacara *Entas-Entas* (Rachmadani, 2012).

Akulturasinya budaya dan penerimaan tradisi-tradisi lokal sebagai bagian dari lingkungan budaya bersama menjadi faktor kuat terciptanya kerukunan di masyarakat. Kegiatan penganut Islam Aboge seperti waktu memulai tanam padi, memanen padi, membuat rumah dan menempati rumah baru berdasarkan pada almanak Aboge dan ditandai dengan kegiatan *slametan*. Kegiatan slametan ini mengundang tetangga untuk membaca tahlil dan doa untuk para leluhur. Selain tradisi slametan, tradisi sedekah bumi yang diadakan oleh pengurus RT atau RW pada bulan Syuro juga menjadi ruang temu bagi penganut aliran Aboge dan masyarakat umum.

Hal yang sama juga ditunjukkan dalam hubungan umat Islam di Tengger. Masyarakat Muslim Tengger hidup harmonis berdampingan dengan masyarakat Tengger yang beragama Hindu dan masyarakat pendatang yang beragama Islam. Mereka melestarikan silaturahmi yang disebut dengan *Sonjo*. Demikian pula dengan acara adat *Kasada* yang merupakan ruang bertemu bersama masyarakat Tengger. Prosesi *Kasada* menunjukkan hubungan antara dukun-dukun Tengger dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat terjalin secara harmonis. Pembacaan mantera dilakukan oleh dukun dan tetua adat, termasuk kehormatan untuk pembacaan mantera *Junggring Saloka* yang diberikan kepada tokoh agama Islam di Desa Tosari yang merupakan gubahan dari do'a secara Islam dengan memakai

bahasa Jawa.

Konteks relasi agama dan tradisi lokal dapat dilihat dalam dinamika hubungan umat muslim yang sangat menarik. Umat Islam di luar dua komunitas tersebut, Islam Aboge maupun Tradisi Tengger dapat menerima keberadaan tradisi lokal tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah keberadaan Islam di lingkungan mereka. Dengan demikian, hubungan antara komunitas yang memegang tradisi lokal dengan umat Islam lainnya berjalan secara positif.

Analisis Geertz (1989: 527) yang membagi masyarakat Jawa dalam tiga varian, priyayi, santri, dan abangan, mengembangkan pandangan bahwa Islam yang dipeluk oleh orang Jawa adalah Islam artifisial yang dilumuri oleh praktek-praktek sinkretisme. Agama hanya memberi sentuhan kulit luar budaya animisme, Hindu, dan Budha yang telah berakar kuat dalam masyarakat Jawa. Faktor daya tawar budaya dalam bentuk akulturasi menjadikan faktor yang dapat mendukung terjadinya relasi damai antarumat Islam sendiri. Masyarakat Jawa muslim dapat menerima kelompok-kelompok muslim yang memegang tradisi lokalnya sebagai bagian dari identitas sosial bersama.

Hubungan harmonis antara agama dengan tradisi lokal sebenarnya bukan hal baru. Menurut Kuntowijoyo (2001: 196), agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, baik dalam mengambil bentuk, simbol, maupun isi/nilai. Proses penerimaan Islam dalam masyarakat tradisional, terutama masyarakat Jawa, akulturasi antara agama dengan budaya lokal cukup kuat. Masyarakat Jawa berhasil mengembangkan kebudayaan yang kaya raya dengan menyerap dan memanfaatkan unsur-unsur agama dan kebudayaan Hindu-Budha, dengan menyesuakannya dengan tradisi Kejawaen (Hasan, 1990: 59). Hal itu sekaligus menjadi strategi dakwah dengan menyajikan Islam dalam kemasan yang atraktif, khususnya dengan menekankan kesesuaian dengan Islam atau kontinuitas, ketimbang perubahan dalam kepercayaan dan praktek keagamaan lokal (Azra,

1998: 32).

Salah satu asumsi dari batas budaya (*cultural boundary*) adalah bahwa budaya adalah “bersama” oleh anggota masyarakat. Oleh karenanya, di dalam kebersamaan tersebut terdapat sifat saling berbagi (*sharedness*), yang dianggap sebagai *trade mark* dari budaya. Asumsi ini menunjukkan bahwa orang-orang dalam suatu sistem budaya berbagi satu set karakter yang unik untuk keanggotaan kelompok mereka, dan saling berbagi sebagai produk dari transmisi budaya dan akuisisi yang sering terjadi melalui interaksi pribadi di antara anggota kedekatan fisik (Chang, 1998). Pada lingkungan Tengger dan Banyumas, terdapat dua identitas yakni identitas budaya Islam dan identitas budaya Tengger, dengan identitas budaya Islam dan identitas budaya Aboge. Masing-masing budaya saling bertemu dalam ruang budaya tertentu dan saling berbagi membentuk budaya bersama, yang disebut tradisi lokal atau tradisi populer seperti *slametan*, sedekah bumi, *Kasada* ataupun *Sonjo*. Tradisi bersama semacam ini mencairkan batas-batas budaya sehingga dapat membangun relasi damai antar pemilik budaya.

2. Relasi Agama dan Etnisitas

Dinamika hubungan intern umat Islam dalam konteks relasi agama dan etnisitas dapat dilihat dalam hubungan intern umat Islam di Kalimantan Tengah. Pandangan masyarakat terhadap situasi hubungan intern umat Islam di Kalimantan Tengah diwarnai kesan atas kejadian kerusuhan di tahun 2001, yakni konflik Suku Dayak dengan Suku Madura. Berbagai kajian menegaskan bahwa konflik tersebut adalah konflik antaretnis, bukan konflik agama (Cahyono, 2008). Madura telah dikenal sebagai warga yang memeluk agama Islam, tetapi warga Dayak pun tidak sedikit yang juga memeluk agama Islam. Di samping itu juga berbagai etnis terdapat di Kalimantan Tengah.

Suku Dayak yang berinteraksi dengan suku Madura, terutama di wilayah perkotaan dan pusat-pusat perekonomian, adalah Dayak muslim atau yang umum menyebut diri sebagai Dayak Pesisir. Suku Dayak dan suku Madura adalah dua

suku yang menonjol dan dominan di Kalimantan Tengah sebelum terjadinya kerusuhan 2001 tersebut. Relasi antara Dayak --termasuk Dayak Pesisir yang muslim-- dengan Madura diwarnai pencitraan dan stereotipe tentang orang Madura yang sudah ada sebelum mereka berinteraksi langsung dengan orang Madura. Ketika di penghujung Februari 2001 konflik etnis antara Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah pecah, tindak pembunuhan dan perusakan nyaris berlangsung di semua wilayah. Semula, kerusakan terjadi hampir sepekan di Kota Sampit, kemudian merembet ke Kuala Kapuas, Pangkalan Bun, dan Palangkaraya. Kurang dari dua pekan, 400 orang Madura terbunuh, dan 80.000 sisanya dipaksa keluar dari bumi Kalimantan untuk kembali ke daerah asalnya Madura, maupun tempat lainnya (Cahyono, ed., 2008: 4-5).

Peristiwa konflik tersebut menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan aspek sosial, budaya, dan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Etnik Dayak kemudian menjadi etnik tunggal yang dominan di Kalimantan Tengah baik secara kultural maupun struktural. Terjadi standarisasi kehidupan sosial budaya dan hukum dengan standar budaya Dayak, yang terlihat dari peran yang dominan dari Dewan Adat Dayak (DAD) terhadap kehidupan sosial, standar cara pandang dan nilai kebudayaan. Misalnya orang pendatang boleh datang kembali ke Kalimantan Tengah dan menjadi saudara orang Dayak melalui falsafah hidup *Huma Betang dan Belum Bahadat*. (Haryanto, 2013).

Pengalaman marginalisasi Dayak di masa lalu hingga sampai terjadi konflik telah mendorong budaya Dayak menjadi budaya dominan, yakni pemosisian status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan dibandingkan budaya yang lain. Dayaksekarang ini telah mampu mengambil peran sosial politik, baik dalam struktur sosial maupun gerakan sosial, seperti ditunjukkan dengan menguatnya struktur adat Dayak, perangkat adat dan pemberlakuan wilayah hukum dan budaya adat. Budaya Dayak sebagai satu-satunya budaya dominan dapat menekan potensi konflik

antaretnis. Walaupun budaya dominan Dayak ini menguat, tetapi faktor intrinsik budaya Dayak sejak awal juga sangat mendukung terciptanya kerukunan di Kalimantan Tengah. Etnis Dayak dikenal memiliki nilai-nilai budaya *huma betang* yang sangat toleran terhadap keberadaan orang lain, ketaatan pada aturan, dan juga kesetaraan. Hal ini menunjukkan kebersediaan untuk hidup rukun dan saling menghormati dalam satu kehidupan bersama.

Pengalaman konflik etnis tahun 2001 antara etnis Dayak dan etnis Madura mendasari pola hubungan antaretnis dewasa ini. Etnis Dayak meneguhkan dominasi melalui jalur kultural maupun struktural, di mana hal ini diterima oleh etnis lain untuk membangun ikatan sosial baru. Dinamika relasi sosial dewasa ini menunjukkan bahwa situasi kerukunan di Kalimantan Tengah telah dapat mencapai tingkat perdamaian, meskipun taraf perdamaian negatif. Perdamaian negatif ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap perbedaan, tetapi secara struktural belum memberi akses yang berimbang pada semua pihak (Susan, 2010: 132). Kebijakan uniformitas yang dikembangkan di Kalimantan Tengah mendorong –atau memaksa– proses keseimbangan dalam masyarakat sebagai kesatuan (Haryanto, 2013). Hal ini termasuk proses institusionalisasi budaya untuk menjamin keselarasan dan berjalannya fungsi-fungsi sosial akibat ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan terjadi (Zamroni, 1992: 25), berupa pertentangan atau konflik sehingga struktur-struktur sosial dalam masyarakat dapat fungsional kembali.

Keragaman kelompok sosial dalam masyarakat muslim di satu sisi rentan dengan munculnya konflik identitas. Namun, perbedaan identitas budaya juga dapat menjadi hal yang mendorong terjadinya kerukunan, atau setidaknya mempertemukan kepentingan masing-masing dalam konteks kebutuhan hidupnya. Dalam konteks masyarakat Kalimantan Tengah, pada masa lalu terjadi marginalisasi terhadap Dayak yang menghalangi

akses terhadap sumber daya ekonomi hutan sehingga menimbulkan konflik. Masyarakat Dayak umumnya memiliki ketergantungan terhadap hutan cukup tinggi. Dari hutan mereka bisa menghasilkan bahan-bahan produksi seperti kayu, rotan, karet, dan sebagainya dengan hasil yang besar. Namun sebagian besar mereka tidak memiliki ketrampilan yang lebih baik untuk mengolah persawahan, membangun gedung, serta menjadi pedagang yang sukses. Akibatnya mereka memiliki ketegantungan dengan etnis lain untuk kepentingan tersebut. Warga etnis Madura selama ini telah dikenal dengan etos kerjanya yang tinggi, bahkan mereka bersedia melakukan pekerjaan kasar dan menerima upah rendah. Demikian juga suku Jawa dikenal ulet dalam bekerja, dan terutama berdagang olah-olahan pangan seperti warung makan. Sementara suku Banjar sejak dahulu dikenal pula sebagai pedagang yang ulet dan berhasil. Ruang temu berupa aktivitas-aktivitas ekonomi yang menjadi simbiosisme ekonomi ini mendorong munculnya interaksi yang asosiatif, akomodatif, dan kerjasama sehingga tercipta kerukunan di antara mereka.

Tampaknya hal ini menjadi salah satu faktor penting keberhasilan rekonstruksi sosial pasca kerusuhan 2001 di Kalimantan Tengah. Dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini, situasi hubungan antaretnis, terutama Dayak dan Madura, telah pulih kembali, bahkan dua tahun dari peristiwa tersebut, warga Madura telah ada yang kembali ke Sampit. Berbeda situasinya dengan Kalimantan Barat yang juga pernah terjadi kerusuhan antaretnis, yakni Melayu dan Dayak tahun 1999. Hubungan Madura dan Melayu sampai sekarang belum pulih, bahkan di Sambas warga Madura belum dapat diterima kembali (Cahyono, 2008: 105). Hal ini karena ruang temu, terutama simbiosisme ekonomi antara Melayu dengan Madura kurang kuat. Antara Melayu dan Madura secara umum memiliki ruang garap ekonomi yang hampir sama sehingga yang terjadi bukan simbiosisme tetapi kontestasi yang cenderung konfliktual.

3. Relasi Agama dan Pemikiran Keagamaan

Dinamika hubungan internumat Islam dalam konteks relasi agama dan pemikiran keagamaan menunjukkan hubungan yang kurang harmonis. Hal ini dapat dilihat dalam hubungan Syiah di Pasuruan dengan masyarakat Islam umumnya yang menganut faham *Ahlussunah Wal Jamaah* (Rachmadani, 2012). Demikian juga pertentangan Yayasan Al-Fatah Sumampir dengan Forum Warga Peduli Masjid di Banyumas (Sodli, 2012). Dalam kasus ini terlihat hubungan dissosiatif yang diakibatkan perbedaan pandangan atau pemikiran keagamaan. Perbedaan pandangan antara Syiah dan Sunni sesungguhnya telah berjalan lama, di mana sejarah konflik keduanya sangat sarat dengan nuansa politik. Sementara pertentangan Yayasan Al-Fatah Sumampir dengan Forum Warga Peduli Masjid, meskipun ditandai dengan perbedaan amaliyah ibadah, tetapi juga sarat dengan kepentingan “politik” dalam pengertian kekuasaan atas pengelolaan masjid.

Masjid Al-Fatah di perumahan Sumampir dibangun tahun 1987, dan baru terbangun sempurna tahun 1995 dengan bantuan dana dari Yayasan Ihya Al Thuras dari Timur Tengah. Aktivitas masjid ini sampai tahun 2010 lancar saja, tidak ada gejolak perpecahan di antara jamaah atau warga perumahan Sumampir Indah. Baru pada tahun 2010 muncul konflik akibat pergantian pengurus takmir yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Al-Fatah. Pengurus takmir yang telah diberhentikan mendirikan Forum Peduli Masjid dan bermaksud melakukan kegiatan Maulid Nabi tetapi tidak diperbolehkan oleh pengurus baru. Akibatnya timbul konflik yang berakhir dengan saling boikot dengan mengunci pintu masjid sehingga tidak bisa digunakan (Sodli, 2012).

Konflik lain terjadi tahun berikutnya, 2011, ketika Forum Peduli Masjid ini menyelenggarakan salat Tarawih di lapangan sebelah masjid dengan memasang tenda untuk menampung jamaah. Perbedaan jumlah rakaat

salat Tarawih menjadi alasan munculnya tarawih tandingan tersebut. Masjid Al Fatah yang sudah berdiri sejak tahun 1995 sampai tahun 2010 sudah biasa melaksanakan sholat Tarawih dan Witr berjumlah sebelas rakaat, sementara pihak Forum Peduli Masjid mengadakan sholat Tarawih yang berjumlah dua puluh tiga rakaat, dua puluh rakaat sholat Tarawih, dan tiga rakaat sholat Witr (Sodli, 2012).

Konflik tersebut ditangani oleh pemerintah daerah dengan melibatkan Kemenag Kabupaten Banyumas, Kesbang Linmas, Kesra Kapolres, dan lainnya. Kegiatan musyawarah bersama pihak-pihak berkonflik dengan aparat pemerintah tersebut menghasilkan keputusan untuk membuat kepengurusan takmir baru masjid Al Fatah yang terdiri dari kedua kelompok dengan diketuai oleh pejabat Kemenag. Langkah ini berjalan baik, karena konflik akhirnya reda. Masyarakat sendiri dalam hubungan sosial tetap berelasi dengan baik.

Sementara kasus hubungan Syiah Pasuruan yang bergabung dalam Pesantren YAPI (Yayasan Pendidikan Islam) di Bangil dengan umat Islam lainnya, menunjukkan adanya pertarungan pemahaman keagamaan antara Syiah yang minoritas dengan pandangan dominan yakni faham Sunni atau *Ahlussunah Wal Jamaah*. Konflik ini terlihat jelas dengan adanya Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah. Menurut Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, faham Syi'ah mempunyai perbedaan pokok dengan *Ahlussunah Wal Jamaah* yang dianut oleh umat Islam di Indonesia dan dipandang tidak memenuhi salah satu kriteria yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat (Rachmadani, 2012).

Pesantren YAPI didirikan Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) di Bangil Pasuruan oleh almarhum Ustadz Husein Bin Abu Bakar Al-Habsyi, pada 21 Juni 1976. Pesantren Ini merupakan Komunitas Syiah yang dikatakan terbesar di Asia Tenggara. Mereka memiliki

lembaga pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, SMP, SMA, Pesantren Putra, Pesantren Putri, dan Hauzah (Ma'had Aly yang khusus mengajarkan ilmu keagamaan Islam). Dalam konteks hubungan sosial, komunitas pesantren ini dengan masyarakat sekitar berlangsung dengan baik dan rukun sejak awal berdirinya (Rachmadani, 2012).

Namun, adanya pelabelan sesat oleh MUI Jatim, dan penyerangan terhadap pesantren oleh kelompok yang mengatasnamakan *Ahlussunah WalJamaah* menunjukkan adanya potensi konflik sebagai akibat perbedaan faham pemikiran keagamaan. Setelah kejadian penyerangan yang menimpa pondok pesantren tersebut, pada tanggal 16 Februari 2011, Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Pasuruan memfasilitasi pertemuan antara tokoh Syi'ah dan Aswaja. Para tokoh yang hadir sepakat bahwa insiden tersebut adalah murni kriminal sehingga siapapun yang bersalah akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak ada kaitannya dengan suku, aliran, ras, dan agama (SARA). Dengan demikian, Syi'ah dengan label sesat yang telah disandangnya, tetap memperoleh perlindungan dan kebebasan beragama di Kabupaten Pasuruan.

Pertentangan antara kelompok Syiah pesantren YAPI dengan masyarakat muslim lainnya tampaknya hanya pada level pemikiran keagamaan. Konflik tersebut malah terjadi dengan masyarakat yang letaknya jauh dari lingkungan pesantren, sementara hubungan dengan masyarakat di sekitar pesantren tetap berjalan baik. Pesantren YAPI beberapa kali melakukan aktivitas bersama, atau kegiatan pesantren yang melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat, misalnya pembagian zakat fitrah dan daging kurban oleh pesantren YAPI kepada masyarakat sekitar diterima dengan baik. Pesantren YAPI juga menyelenggarakan pelatihan pengelolaan sampah yang diikuti oleh masyarakat luas. Selain itu, Pesantren YAPI juga menyediakan mobil ambulans gratis bagi masyarakat yang membutuhkan dan memberikan beasiswa bagi anak kurang mampu yang belajar

di lembaga pendidikannya. (Rachmadani, 2012).

Perbedaan pandangan dalam Islam sebenarnya bukan hal yang baru, terutama pasca peristiwa *tahkim* antara pihak Khalifah Ali ibn Abu Thalib dengan Gubernur Mu'awiyah yang melahirkan kelompok Syiah yang mendukung Ali, kelompok pendukung Mu'awiyah, dan kelompok Khawarij yang menentang kelompok Ali maupun Mu'awiyah. Kelompok-kelompok ini kemudian berkembang menjadi aliran pemikiran yang saling mendukung kelompok masing-masing. Dengan demikian perbedaan-perbedaan pemikiran dilandasi dengan orientasi politik kelompok, bahkan aliran pemikiran yang awalnya tidak berangkat dari politik akhirnya juga mengalami politisasi melalui kolaborasinya dengan penguasa, seperti teologi Mu'tazilah yang diadopsi oleh Khalifah Al-Ma'mun (813-833 M), kemudian dibatalkan dan diganti dengan teologi Asy'ariyah pada masa khalifah Al-Mutawwakil (856 M) (lihat Nasution, 1986: 4-9).

Keberadaan Syiah di Indonesia juga sudah terjadi dalam masa yang lama bahkan juga turut membangun dan mengembangkan Islam awal di Nusantara, diduga kuat Syiah pernah menjadi kekuatan politik pada masa awalnya sehingga menjadi bagian dari wajah Islam awal Indonesia. Banyak studi menunjukkan bahwa sekalipun Indonesia mayoritas Islam Sunni, tetapi banyak fakta menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Syiah di "negeri Sunni" ini (Jamil 2012. 3-9). Oleh karena itu, konflik pesantren YAPI dan kelompok Aswaja memiliki kemungkinan di luar faktor perbedaan pemikiran, tetapi faktor lain seperti politik, ekonomi, atau budaya. Kelompok Aswaja yang melakukan penyerangan terhadap Pesantren YAPI ternyata juga tidak diakui sebagai bagian Ormas Nahdlatul Ulama (NU), sebagaimana disampaikan oleh KH. AD Rachman Syakur, Ketua Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Pasuruan.

Dengan demikian, hubungan intern umat Islam menunjukkan bahwa budaya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membangun relasi antarkelompok dalam umat Islam.

Budaya yang merupakan *indigenous tradition* umumnya dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi kebudayaan bersama yang mampu menyatukan umat Islam dan mencairkan batas-batas identitas di lingkungannya, misalnya Islam yang menggunakan budaya Jawa dalam bentuk akulturasi, baik bentuk simbol maupun nilai. Namun budaya yang dipandang dari luar, “budaya import” yang kurang mampu mengakomodasi tradisi-tradisi populer di masyarakat akan semakin mempertegas jarak sosial dan batas-batas budaya tiap-tiap kelompok, akibatnya relasi yang terbangun cenderung relasi konflik.

Relasi Agama dan Budaya sebagai Strategi Kerukunan

Dinamika hubungan intern umat Islam dalam konteks relasi antara agama dan budaya, dapat dilihat dalam tiga bentuk relasi, yaitu relasi agama dan tradisi lokal, relasi agama dan etnisitas, serta relasi agama dan pemikiran keagamaan. Dalam kasus penganut Islam Aboge di Kebumen dan masyarakat tradisional di Tengger Pasuruan, dinamika hubungan terbentuk dalam penerimaan terhadap tradisi lokal yang diterima sebagai ikatan sosial bersama. Dalam prakteknya, tradisi-tradisi lokal ini dapat menjadi kohesi sosial karena oleh para pelaku atau pemilik kebudayaan, tradisi tersebut sebenarnya telah mengalami modifikasi sebagai bentuk akulturasi sehingga dapat diterima oleh kelompok yang berbeda. Terlebih dalam konteks setting masyarakat Jawa, tradisi-tradisi keagamaan populer memiliki keterkaitan dengan tradisi masa lalu yang tetap dijaga dan dipelihara. Terutama masyarakat Jawa yang mudah bersikap akomodatif, menyebabkan masuknya budaya di luar dirinya melalui proses mekanisme akomodasi dan seleksi dalam diri kebudayaannya akan terserap secara selektif (Musahadi, 2007: 9).

Akulturasi menunjukkan daya tawar yang setara, di mana pihak-pihak pemilik kebudayaan bersama-sama mengambil bagian untuk “*take and give*” budaya bagi proses adaptasi di lingkungan bersama. Dengan demikian kadar perdamaian yang dibangun melalui akulturasi lebih kuat

dengan dukungan para pemilik identitas budaya. Terlebih dengan adanya penyatuan budaya atau akulturasi yang menciptakan ikatan sosial baru atau memperkuat ikatan sosial yang telah ada, dan semakin menuju pada keseimbangan, sebagaimana ditunjukkan dalam fungsionalisme struktural (Zamroni, 1992: 25).

Namun berbeda situasinya dalam relasi agama dan etnisitas, sebagaimana dalam hubungan antar etnis di Kalimantan Tengah. Sekalipun dalam satu agama, yakni agama Islam, tetapi hubungan sosial sangat kuat dengan nuansa etnosentrisme. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan yang didasari pada pandangan atas citra atau stereotip satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Perbedaan-perbedaan budaya antaretnis tampak dalam sistem nilai budaya (*cultural value system*) dan orientasi nilai budaya (*cultural value orientation*), di mana dua hal ini selalu diproduksi dan menjadi bingkai pembatas antarkebudayaan (*cultural boundaries*). Akibatnya muncul sikap egosentris dan etnosentrisme yang terwujud dalam bentuk stereotip dan prejudis (prasangka) (Musahadi 2007: 12). Hal inilah yang mewarnai interaksi sosial antaretnis yang bersifat dissosiatif, bahkan dapat berbentuk konflik (Taneko, 1990: 116).

Konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah antara etnis Dayak dan Madura memunculkan dampak budaya yang cukup signifikan dalam konteks hubungan antaretnis. Budaya Dayak secara politis menguat menjadi budaya dominan atas budaya lainnya, dan mengendalikan hubungan antaretnis sehingga situasi yang aman dan tertib dapat terwujud. Namun budaya dominan yang mendorong terjadinya uniformitas budaya konteks hubungan masyarakat sesungguhnya bukan hubungan yang ideal. Dominasi menunjukkan adanya superioritas satu pihak terhadap pihak lain. Situasi di mana pemilik budaya dominan kuat secara politis (maupun kekuasaan), kelompok-kelompok yang inferior akan cenderung mengalah sehingga tidak terjadi pertentangan dalam masyarakat.

Situasi damai semacam ini sebenarnya rapuh, terutama saat terjadi perubahan situasi politik dan sosial di mana dapat muncul perlawanan dari pemilik budaya minoritas terhadap kelompok budaya dominan. Hal ini sebenarnya patut untuk diwaspadai karena budaya dominan juga mendorong munculnya seperangkat prasangka terhadap golongan lain yang ada dalam masyarakatnya. Prasangka ini berkembang berdasarkan pada adanya perasaan superioritas pada mereka yang tergolong dominan; menganggap kelompok lain sebagai orang asing; dan adanya klaim bahwa akses sumber daya yang ada adalah hak mereka, dan disertai kecurigaan kelompok lain akan mengambil sumberdaya-sumberdaya tersebut (Suparlan, 2004). Dengan demikian, penerimaan terhadap budaya dominan ini hanya strategi *Coping* berupa tindakan diam dan menghindari masalah untuk memelihara eksistensinya dan menjaga agar tetap *survive* dengan tidak memancing persoalan dengan kelompok lain yang dapat menimbulkan kesulitan bagi dirinya di lingkungan budaya dominan (Farida, 2006: 25).

Sementara hubungan intern umat Islam dalam relasi agama dan pemikiran keagamaan, seperti dalam hubungan Pesantren YAPI yang aliran Syiah dengan kelompok Aswaja yang mengklaim dirinya Sunni, ataupun yayasan Al-Fatah dengan Forum Warga Peduli Masjid dalam konteks pemikiran keagamaan sulit dipertemukan. Ruang temu yang bisa diterima semua pihak hanya ruang sosial dan ruang kepentingan praksis. Perbedaan pemikiran keagamaan lebih sulit untuk dipertemukan dan akhirnya juga kurang mampu mendorong proses kerukunan dibandingkan perbedaan budaya dan tradisi. Hal itulah yang menjadikan hubungan antara komunitas Syiah dan yayasan masjid Al-Fatah berpotensi sebagai relasi konflik.

Dinamika hubungan intern umat beragama yang dialami oleh minoritas Syi'ah di Kabupaten Pasuruan maupun yayasan Al-Fatah di Banyumas merujuk kepada kajian Rodriguez (dalam Jamil, 2012: 13), adalah merupakan dinamika identitas,

terutama identitas minoritas di tengah identitas mayoritas memang seringkali menampakkan relasi konflik dan damai secara terpisah, maupun relasi konflik-damai secara sekaligus. Secara sosiologis, kelompok semacam ini sering dipandang sebagai kelompok yang mengalami marginalisasi dan stigmatisasi. Dalam relasi minoritas terhadap mayoritas ini, persoalan identitas kelompok minoritas seringkali dianggap sebagai kelompok yang menyimpang atau sempalan (*splinter group*). Oleh karena itu, cara-cara kelompok ini menjaga identitas dan kelangsungan keberadaannya juga berhubungan dengan masyarakat sekitarnya adalah merupakan suatu proses interaksi.

Di antara strategi untuk menjaga eksistensi mereka dalam lingkungan dominan, yang secara laten dianggap menjadi ancaman, maka kelompok-kelompok minoritas mengambil ruang temu yang memungkinkan mereka bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Faktor ruang temu budaya, hal mana kebutuhan untuk hidup bersama memaksa semua pihak untuk melakukan pertukaran sosial, saling menerima dan bekerjasama untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bisa dipenuhinya sendiri. Salah satu perangkat pemenuhan kebutuhan adalah ekonomi, di mana interaksi yang berjalan secara positif akan mendorong kerjasama, tetapi sebaliknya, interaksi yang terjadi secara asertif atau negatif maka malah akan menimbulkan pertentangan (Taneko, 1990: 116).

Ruang budaya tersebut dapat berupa ruang-ruang ekonomi ataupun ruang-ruang ekspresi budaya. Keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mendorong interaksi dengan orang lain. Itu sebabnya dalam relasi konflik sekalipun, komunitas Syiah maupun yayasan Al-Fatah tetap dapat bekerjasama dan beraktivitas sosial bersama dengan umat Islam lainnya. Strategi adaptasi ini dengan sendirinya juga mendukung terciptanya situasi yang

aman di lingkungan mereka, sekalipun situasi damai yang terwujud merupakan perdamaian negatif. Perdamaian dalam pengertian negatif adalah istilah untuk menunjukkan situasi yang nir-kekerasan, tidak adanya kekerasan secara langsung. Namun situasi demikian, sesungguhnya masih memungkinkan terjadinya kekerasan-kekerasan yang non-fisik, seperti kekerasan struktural maupun kultural (Susan, 2010: 130-135).

Untuk menuju pada masyarakat damai yang menyeluruh diperlukan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan dalam konfigurasi sosial di masyarakat. Kemajemukan etnis, perbedaan pandangan keagamaan, dan keragaman tradisi sesungguhnya modal penting bagi perkembangan masyarakat apabila mampu disikapi sebagai kekayaan sosial budaya. Keragaman ini tidak disikapi hanya sebagai perbedaan belaka, melainkan menjadi dasar untuk melakukan relasi akomodasi dan kerjasama, dan inilah yang disebut sebagai multikulturalisme. Menurut Hendar Putranto (dalam Ujan, et.al., 2009: 15) multikulturalisme adalah paham yang berbasis pada kepercayaan akan adanya dan pentingnya menghargai sekaligus mengakui (*affirmation and recognition*) terhadap keanekaragaman budaya (*cultural diversity*). Suparlan (2004) mendefinisikan multikulturalisme sebagai sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individual maupun secara kelompok, dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif yaitu sukubangsa (dan ras), gender, dan umur.

Dengan demikian, hubungan intern umat beragama dalam bentuk relasi damai akan sangat terdukung apabila dalam masyarakat dikembangkan kesadaran multikulturalisme. Wawasan multikulturalisme ini dapat menutup kerapuhan relasi sosial yang didasarkan pada hubungan dominan-minoritas, karena hal tersebut dapat menyebabkan munculnya sikap

diskriminasi yang berujung pada pertentangan bahkan konflik di masyarakat. Adapun cara yang terbaik untuk mempererat kohesi sosial masyarakat adalah dengan mengubah masyarakat majemuk (*plural society*) menjadi masyarakat multikultural (*multicultural society*) dengan cara mengadopsi ideologi multikulturalisme sebagai pedoman hidup dan sebagai keyakinan bangsa Indonesia untuk diaplikasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia (Suparlan, 2004).

Interaksi sosial yang terjadi antar kelompok dalam masyarakat, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama, meniscayakan proses *take and give*, ada proses menyerap dan diserap dalam tradisi dan budaya. Pada pertemuan budaya inilah sebenarnya batas-batas budaya akan cair sehingga menjadi kohesi yang mengikat etnis-etnis tersebut, baik dalam bentuk multikulturalisme, akulturasi, atau ikatan budaya baru, budaya hibrida, tanpa harus kehilangan jati diri dan identitas aslinya. Multikulturalisme meniscayakan pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman, sekaligus terbuka bagi dialog budaya antarmasyarakat yang memungkinkan terciptanya kerukunan yang sesungguhnya.

PENUTUP

Hubungan intern umat Islam secara dinamis berkaitan dengan identitas-identitas kelompok yang dikuatkan dengan identitas keagamaan maupun identitas budaya. Identitas-identitas budaya tersebut dapat berwujud identitas etnis, identitas tradisi lokal, maupun identitas pemikiran keagamaan. Dinamika hubungan dapat menuju kepada kerukunan intern umat Islam karena adanya faktor-faktor yang mendukung ke arah kerukunan tersebut. Di antaranya adalah faktor daya tawar budaya, di mana pemilik identitas budaya melakukan kompromi yang pada akhirnya menjadikan akulturasi budaya, atau dominasi budaya sehingga mewujudkan uniformitas budaya yang keduanya sama-sama mendukung terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Faktor ruang temu budaya, hal mana

kebutuhan untuk hidup bersama memaksa semua pihak untuk melakukan pertukaran sosial, saling menerima dan bekerjasama untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan. Ruang budaya tersebut dapat berupa ruang-ruang ekonomi ataupun ruang-ruang ekspresi budaya. Faktor lainnya adalah peran tokoh masyarakat dan pemerintah yang dalam masyarakat Indonesia yang patrilineal keberadaan tokoh-tokoh sebagai patronase sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat.

Strategi adaptasi yang dilakukan oleh umat Islam dalam upaya membangun kerukunan di lingkungannya, diantaranya melalui strategi kultural, yakni akulturasi, dan membangun budaya dominan. Strategi lainnya melalui strategi struktural, yakni dengan memanfaatkan kekuasaan pemerintah, dan legalitas normatif untuk menjaga situasi yang aman dan tertib.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pimpinan di Balai Litbang Agama Semarang yang memberi kesempatan penulis melakukan penelitian tentang dinamika intern umat Islam yang menjadi bahan tulisan ini. Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Drs. H. Ahmad Sodli dan Arnis Rachmadani, SS., MSI., rekan peneliti atas hasil penelitiannya untuk dianalisis bersama dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. 1998. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*. Bandung: Mizan.
- Cahyono, Heru. Dkk. 2008. *Konflik Kalbar dan Kalteng Jalan Panjang Meretas Perdamaian*. Yogyakarta: P2P-LIPI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Chang, Heewon. 1998. "Re-examining the Rhetoric of the Cultural Border" dalam <http://www.edchange.org/multicultural/papers/heewon.html> diunduh 6 Juni 2015.
- Farida, Anik. 2006. "Survival Umat Khonghucu dalam Pemenuhan Hak-hak Sipil". Dalam Alam, Rudy Harisyah (ed). *Adaptasi dan Resistensi Kelompok-kelompok Sosial Keagamaan*. Jakarta: Penamadani bekerjasama dengan Balai Litbang Agama Jakarta. Hlm. 19-50.
- Geertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Haryanto, Joko Tri. 2012. *Dinamika Hubungan Intern Umat Beragama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah (Studi Relasi Agama dan Etnisitas pada Masyarakat Kalimantan Tengah)*". Laporan Hasil Penelitian. Semarang: Balai Litbang Agama.
- _____. 2013. "Dinamika Kerukunan Intern Umat Islam dalam Relasi Etnisitas Dan Agama Di Kalteng". *Jurnal Analisa Volume 20 Nomor 01 Januari - Juni 2013* Balai Litbang Agama Semarang. Hlm. 13-24.
- Hasan, Ahmad Rifa'i (Ed.) 1990. *Warisan Intelektual Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Jamil, M. Muhsin. 2012. "Dinamika Identitas dan Strategi Adaptasi Minoritas Syi'ah di Jepara". Ringkasan Disertasi Program Doktor Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.
- Kuntowijoyo. 2001. *Muslim Tanpa Masjid, Essai-Essai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan.
- Musahadi, HAM. (Ed.). 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, dari Konflik Agama hingga Mediasi Pengadilan*. Semarang: WMC Walisongo Mediation Centre IAIN Walisongo.
- Nasikun. 1992. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali press.
- Nasution, Harun. 1986. *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Rachmadani, Arnis. 2012. "Dinamika Hubungan Intern Umat Beragama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah (Studi di Jawa Timur)". Laporan Hasil Penelitian. Semarang: Balai Litbang Agama.
- Sodli, Ahmad. 2012. "Dinamika Hubungan Intern Umat Beragama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah (Studi di Jawa Tengah)". Laporan Hasil Penelitian. Semarang: Balai Litbang Agama.
- Soekanto, Suryono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi baru ke-4. Cetakan 20. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suparlan. 2004. "Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multiultural, dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-hak Minoritas". Makalah dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia?, Wisma PKBI, 10 Agustus 2004. Dalam http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/masyarakat_majemuk.html diunduh 6 Juni 2010.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Taneko, Soleman. B. 1990. *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Edisi 1. Cetakan 2. Jakarta: CV Rajawali.
- Ujan, Andre Ata et.al. 2009. *Multikulturalisme, Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT.Indeks.
- Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.